

## ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROPINSI JAMBI (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi)

Enggar D. P. A, Sri Rahayu dan I. Wahyudi

*Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah Propinsi Jambi. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPI. Hasil yang diperoleh adalah: penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 2002 – 2009 mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada pada kategori sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai sector yang sangat efektif dan efisien.

*Kata kunci: pajak daerah, efektivitas, efisiensi.*

### PENDAHULUAN

UU (Undang-Undang Dasar) Tahun 1945, BAB VI yang membahas tentang pemerintahan daerah yang telah mengalami perubahan (amandemen) kedua di tahun 2000 menjadi Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B; merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagaimana yang telah dimuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP MPR No.XV/MPR/1998 ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, baik berkaitan dengan masalah desentralisasi kewenangan (*power sharing*) maupun desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*) (Mulyanto, 2002).

Dengan ditetapkannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip: (i) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; (ii) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota; (iii) pemberdayaan masyarakat; serta (iv) pendayagunaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup. Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan

untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta, antara lain: (i) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah; (ii) berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta (iii) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soedjito, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003).

Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang Perpajakan Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 11 tahun 1994, merupakan Undang-undang yang menjadi acuan dalam perpajakan (Suarja, 2007).

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya (Riduansyah, 2003).

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika

pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya. ada perbedaan lapangan pajak antara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah propinsi memiliki 4 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Propinsi Jambi, yang memiliki sumberdaya alam yang cukup besar, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan memperbesar penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Melihat kontribusi dan potensi dari pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu kiranya dilakukan kajian tentang efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah di Propinsi Jambi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel yang menjadi tujuan penelitian,

yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah Propinsi Jambi.

#### Definisi Operasional Variabel

Sekaran (2003:87) menyatakan bahwa: "A variable is anything that can take on differing or varying values. The values can differ at various times for the same object or person, or at the same time for different objects or persons". Senada dengan Sekaran, Mudrajad Kuncoro (2003:41) yang menyatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan nilai atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang sama. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dipahami konsep operasional dan indikator variabel penelitiannya sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah atau hasil/output pajak daerah dengan total biaya pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pajak daerah pertahun dalam satuan persentase.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan untuk masing-masing jenis pajak daerah dengan sasaran atau target penerimaan masing-masing jenis pajak daerah yang direncanakan pertahun dalam satuan persentase.
3. Biaya pemungutan penerimaan pajak daerah adalah segala biaya yang timbul atau dikeluarkan sebagai akibat kegiatan operasional dalam memungut pajak daerah dalam satuan rupiah pertahun.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa realisasi dan target penerimaan pajak daerah di Propinsi Jambi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Propinsi Jambi.

#### Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2002:123). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi terhadap subjek penelitian.

#### Metode Analisis Data

Dalam upaya memperoleh jawaban tujuan permasalahan pertama dalam penelitian ini terutama perkembangan setiap tahun dari variabel yang diukur yaitu penerimaan pajak daerah untuk masing-masing sector dilakukan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan Dajan (1986) sebagai berikut:

$$\text{Perkembangan PD}_{it} = \frac{\text{PD}_{it} - \text{PD}_{it-1}}{\text{PD}_{it-1}} \times 100$$

Dimana:

PD<sub>it</sub> = Pajak Daerah jenis i pada tahun tertentu

PD<sub>it-1</sub> = Pajak daerah jenis i pada tahun sebelumnya

Untuk menjawab tujuan permasalahan kedua yaitu tingkat efisiensi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah digunakan metode CCER (*Cost of Collection Ratio*) yaitu perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut: (Sidik, 1994)

$$\text{CCER}_{it} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PD}_{it}}{\text{Realisasi PD}_{it}} \times 100$$

Dimana:

CCER<sub>it</sub> = Persentase tingkat efisiensi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

PD<sub>it-1</sub> = Pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

Hasil pengukuran tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah di Propinsi Jambi akan memberikan kategori nilai sebagai berikut:

1. Sangat efisien (0 – 20%)
2. Efisien (21% - 40%)
3. Cukup efisien (41% - 60%)

4. Tidak efisien (61% - 80%)
5. Sangat tidak efisien (> 80%).

Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah untuk masing-masing sektor digunakan metode *Charge Performance Index* (CPI) yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan sasaran atau target penerimaan pajak daerah yang direncanakan. Rumusnya adalah:

$$CPI_{it} = \frac{\text{Realisasi PD}_{it}}{\text{Target PD}_{it}} \times 100$$

Dimana:

$CPI_{it}$  = Persentase tingkat efektivitas pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

$PD_{it-1}$  = Pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

Hasil pengukuran tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Propinsi Jambi akan memberikan kategori nilai sebagai berikut:

1. Koefisien efektivitas bernilai dibawah 40% artinya sangat tidak efektif.
2. Koefisien efektivitas bernilai antara 40% - 60% artinya tidak efektif.
3. Koefisien efektivitas bernilai antara 60% - 80% artinya cukup efektif.
4. Koefisien efektivitas bernilai antara 80% - 100% artinya efektif.
5. Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% artinya sangat efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi

#### Total Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi

Perkembangan yang terjadi pada sektor-sektor penerimaan Pajak Daerah yang ada membawa pengaruh terhadap peningkatan atau perkembangan penerimaan Pajak Daerah secara total di Propinsi Jambi. Penerimaan total PBB selama kurun waktu tahun 2002 – 2009 mengalami perkembangan sebesar 254,45% dari Rp 128.718.257.750,56 pada tahun 2002 menjadi Rp 438.524.170.383,- pada tahun 2009.

Perkembangan yang terbesar dari total penerimaan pajak daerah propinsi Jambi dalam kurun waktu diatas terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 45,98% dan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -16,79% atau rata-rata setiap tahun selama kurun waktu 8 tahun mengalami perkembangan sebesar 18,95%.

#### Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Propinsi Jambi sebagai akibat dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendorong terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat. Perubahan status sosial ekonomi masyarakat terlihat dari makin banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor di Propinsi Jambi. Sebagai akibat dari perubahan ini, tingkat penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor juga ikut meningkat.

Tabel 1. Total Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi
2002	80.500.000.000	123.718.257.751	0,00
2003	150.514.000.000	180.605.667.907	45,98
2004	205.863.550.000	246.153.517.603	36,29
2005	246.423.673.000	281.722.332.085	14,45
2006	297.816.173.800	311.238.808.551	10,48
2007	336.930.549.540	372.444.014.569	19,67
2008	380.935.160.000	527.008.669.551	41,50
2009	423.795.726.000	438.524.170.383	-16,79
Rata-rata			18,95

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

Tabel 2. Penerimaan PKB Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	% Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah
2002	31.681.426.000	41.933.456.966	0,00	33,89
2003	50.000.000.000	58.612.691.150	39,78	32,45
2004	63.250.000.000	76.625.526.230	30,73	31,13
2005	79.249.081.600	92.308.126.400	20,47	32,77
2006	90.120.314.400	108.045.942.395	17,05	34,71
2007	108.120.314.400	123.359.340.560	14,17	33,12
2008	129.315.000.000	157.940.862.795	28,03	29,97
2009	163.000.000.000	172.043.401.655	8,93	39,23
Rata-rata			19,89	33,41

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

Penerimaan pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama kurun waktu 2002 – 2009 terus mengalami peningkatan yaitu Rp 41.933.456.966 pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp 172.043.401.655 pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 310,28%. Selama periode 8 tahun, rata-rata penerimaan PKB adalah sebesar 19,89%. Perkembangan penerimaan PKB tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 39,78% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2009.

Peningkatan pajak daerah dari sektor PKB membawa pengaruh terhadap besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah secara

total. Kontribusi PKB terhadap pajak daerah selama 8 tahun rata-rata setiap tahun sebesar 33,41% dan dalam hal ini menempati urutan pertama dari 7 (tujuh) sector pajak daerah.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Seiring dengan bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan masyarakat, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga ikut mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penerimaan BBN-KB Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	% Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah
2002	36.818.574.000	61.115.937.800	0	0,49
2003	70.000.000.000	90.256.822.600	47,68	0,50
2004	109.000.000.000	132.486.967.900	46,79	0,54
2005	129.006.061.400	143.176.639.700	8,07	0,51
2006	144.559.222.000	116.708.236.050	-18,49	0,37
2007	128.000.000.000	140.845.123.755	20,68	0,38
2008	140.800.000.000	231.202.857.060	64,15	0,44
2009	130.000.000.000	142.862.392.060	-38,21	0,33
Rata-rata			16,33	0,44

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

Penerimaan pajak daerah dari BBN-KB selama kurun waktu 2002 – 2009 terus mengalami peningkatan yaitu Rp 61.115.937.800 pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp 142.862.392.060 pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 133,75%. Selama periode 8 tahun, rata-rata penerimaan BBN-KB adalah sebesar 16,33%. Perkembangan penerimaan BBN-KB tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 64,15% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2009.

Peningkatan pajak daerah dari sector BBN-KB membawa pengaruh terhadap besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah secara total. Kontribusi BBN-KB terhadap pajak daerah selama kurun waktu 8 tahun rata-rata setiap tahun sebesar 0,44% dan dalam hal ini menempati urutan kedua dari 7 (tujuh) sector pajak daerah.

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor selain meningkatkan BBN-KB juga meningkatkan PBB-KB. Peningkatan PBB-KB selama kurun waktu 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 4.

Penerimaan pajak daerah dari PBB-KB selama kurun waktu 2002 – 2009 terus mengalami peningkatan yaitu Rp 20.601.641.879 pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp 112.212.019.387 pada tahun 2009

atau mengalami peningkatan sebesar 444,68%. Selama periode 8 tahun, rata-rata penerimaan PBB-KB adalah sebesar 27,02%. Perkembangan penerimaan PBB-KB tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 88,3% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2009.

Peningkatan pajak daerah dari sector PBB-KB membawa pengaruh terhadap besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah secara total. Kontribusi PBB-KB terhadap pajak daerah selama kurun waktu 8 tahun rata-rata setiap tahun sebesar 0,22% dan dalam hal ini menempati urutan ketiga dari 7 (tujuh) sector pajak daerah.

Penerimaan Pajak Kendaraan Diatas Air (PKDA)

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya tercermin dari kepemilikan kendaraan bermotor saja. Peningkatan kesejahteraan ini juga ditandai dengan peningkatan kepemilikan kendaraan diatas air oleh masyarakat di Propinsi Jambi.

Pada tahun 2002 penerimaan pajak daerah dari Pajak Kendaraan diatas Air (PKDA) belum ditargetkan, tetapi ternyata realisasinya ada sebesar Rp 7.755.700. karena itu mulai tahun 2003 PKDA mulai dibuat target penerimaannya. Peningkatan PKDA selama 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 5.

Penerimaan pajak daerah dari PKDA selama kurun waktu 2002 – 2009 terus mengalami peningkatan yaitu Rp 7.755.700

Tabel 4. Penerimaan PBB-KB Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	% Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah
2002	12.000.000.000	20.601.641.879	0	0,17
2003	30.200.000.000	31.128.414.845	51,10	0,17
2004	33.000.000.000	36.300.221.755	16,61	0,15
2005	37.445.000.000	45.493.753.186	25,33	0,16
2006	62.400.000.000	85.664.708.311	88,30	0,28
2007	100.000.000.000	107.457.817.385	25,44	0,29
2008	110.000.000.000	137.061.514.985	27,55	0,26
2009	130.000.000.000	112.212.019.387	-18,13	0,26
Rata-rata			27,02	0,22

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

Tabel 5. Penerimaan PKDA Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	% Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah
2002	-	7.755.700	0	0,00006
2003	13.500.000	62.118.600	700,94	0,00034
2004	63.000.000	70.213.400	13,03	0,00029
2005	67.200.000	74.173.700	5,64	0,00026
2006	73.920.000	80.388.550	8,38	0,00026
2007	81.312.000	59.440.900	-26,06	0,00016
2008	81.500.000	52.213.900	-12,16	0,00010
2009	60.000.000	56.623.350	8,44	0,00013
Rata-rata			87,28	0,00020

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp 56.623.350 pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 630%. Selama periode 8 tahun, rata-rata penerimaan PKDA adalah sebesar 87,28%. Perkembangan penerimaan PKDA tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 700,94% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2007.

Peningkatan pajak daerah dari sector PKDA membawa pengaruh terhadap besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah secara total. Kontribusi PKDA terhadap pajak daerah selama kurun waktu 8 tahun rata-rata setiap tahun sebesar 0,0002% dan dalam hal ini menempati urutan kelima dari 7 (tujuh) sector pajak daerah.

#### Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBN-KDA)

Peningkatan kepemilikan kendaraan diatas air oleh masyarakat di Propinsi Jambi juga mengakibatkan peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air (BBN-KDA). Peningkatan BBN-KDA selama kurun waktu 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 6.

Tahun 2002 penerimaan pajak daerah dari BBN-KDA berdasarkan data DIPENDA belum ada. Namun berdasarkan realisasi penerimaan PKDA tahun 2002 maka pada tahun 2003 dibuat target penerimaannya. Selama kurun waktu 2003 – 2009 BBN-KDA terus mengalami peningkatan yaitu Rp 525.000 pada tahun 2003 meningkat menjadi

Tabel 6. Penerimaan BBN-KDA Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	% Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah
2002	-	-	0	0,000000
2003	500.000	525.000	0,00	0,000003
2004	550.000	1.072.250	104,24	0,000004
2005	600.000	747.250	-30,31	0,000003
2006	660.000	803.750	7,56	0,000003
2007	660.000	751.050	-6,56	0,000002
2008	660.000	601.150	-19,96	0,000001
2009	726.000	765.900	27,41	0,000002
Rata-rata			10,30	0,000002

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

Rp 765.900 pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 45,89%. Selama periode 7 tahun, rata-rata penerimaan BBN-KDA adalah sebesar 10,30%. Perkembangan penerimaan BBN-KDA tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 104,24% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2005.

Peningkatan pajak daerah dari sector BBN-KDA membawa pengaruh terhadap besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah secara total. Kontribusi BBN-KDA terhadap pajak daerah selama kurun waktu 7 tahun rata-rata setiap tahun sebesar 0,000002% dan dalam hal ini menempati urutan ketujuh dari 7 (tujuh) sector pajak daerah.

Penerimaan Pajak Air Permukaan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari peningkatan penerimaan pajak daerah dari pajak air permukaan. Pada tahun 2002 pajak air permukaan belum ditargetkan, tetapi ternyata ada realisasinya sebesar Rp 59.465.405,43. Karena itu mulai tahun 2003 pajak air permukaan sudah ditargetkan sebagai penerimaan pajak daerah. Peningkatan pajak air permukaan selama tahun 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 7.

Selama kurun waktu 2002– 2009 pajak air permukaan terus mengalami peningkatan yaitu Rp 59.465.405 pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp 693.596.131 pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 1066,39%. Selama periode 8 tahun, rata-rata penerimaan pajak air permukaan adalah sebesar 4,71%. Perkembangan

penerimaan pajak air permukaan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 24,11% sedangkan yang terendah pada tahun 2007.

Peningkatan pajak daerah dari sector pajak air permukaan membawa pengaruh terhadap besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah secara total. Kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah selama kurun waktu 8 tahun rata-rata setiap tahun sebesar 0,0018% dan dalam hal ini menempati urutan keempat dari 7 (tujuh) sector pajak daerah.

Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah

Selain dari penerimaan pajak air permukaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari peningkatan penerimaan pajak daerah dari pajak air bawah tanah. Pada tahun 2002 pajak air bawah tanah belum ada, tetapi ditahun 2003 sudah mulai ditargetkan dan ternyata realisasinya lebih besar daripada target yang ditetapkan. Peningkatan pajak air bawah tanah selama tahun 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 8.

Selama kurun waktu 2003– 2009 pajak air bawah tanah terus mengalami peningkatan yaitu Rp 54.509.571 pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp 70.738.395 pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 29,77%. Selama periode 7 tahun, rata-rata penerimaan pajak

air bawah tanah adalah sebesar 3,74%. Perkembangan penerimaan pajak air permukaan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 18,84% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2005.

Tabel 7. Penerimaan Pajak Air Permukaan Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	% Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah
2002	-	59.465.405	0	0,0005
2003	270.000.000	490.586.141	0,00	0,0027
2004	490.000.000	608.880.383	24,11	0,0025
2005	606.080.000	615.827.990	1,14	0,0022
2006	611.460.600	675.667.848	9,72	0,0022
2007	672.606.660	658.810.497	-2,49	0,0018
2008	675.000.000	679.410.569	3,13	0,0013
2009	672.000.000	693.596.131	2,09	0,0016
Rata-rata			4,71	0,0018

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

Tabel 8. Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Propinsi Jambi Tahun 2002 – 2009 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	% Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah
2002	-	-	0	0,000000
2003	30.000.000	54.509.571	0,00	0,000302
2004	60.000.000	60.635.685	11,24	0,000246
2005	49.650.000	53.063.859	-12,49	0,000188
2006	50.596.800	63.061.647	18,84	0,000203
2007	55.656.480	62.730.422	-0,53	0,000168
2008	63.000.000	71.209.092	13,52	0,000135
2009	63.000.000	70.738.395	-0,66	0,000161
Rata-rata			3,74	0,000175

Sumber: Dipenda Propinsi Jambi

Peningkatan pajak daerah dari sector pajak air bawah tanah membawa pengaruh terhadap besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah secara total. Kontribusi pajak air bawah tanah terhadap pajak daerah selama kurun waktu 7 tahun rata-rata setiap tahun sebesar 0,000175% dan dalam hal ini menempati urutan keenam dari 7 (tujuh) sector pajak daerah.

#### **Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Perbandingan antara besarnya target yang ditetapkan terhadap realisasi pencapaian target PKB setiap tahun memberikan angka yang menggambarkan tingkat efektifitas dalam pemungutan. Tingkat efektifitas ini juga harus didukung dengan biaya yang dikeluarkan di lapangan. Realisasi pencapaian yang melebihi target akan memberi pengaruh terhadap kontribusi yang akan diberikan terhadap

penerimaan total pajak daerah jika diikuti dengan adanya upaya atau kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan di lapangan serendah mungkin.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam kurun waktu 2002 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PKB dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 8 tahun sangat efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa pencapaian penerimaan pajak daerah dari sektor PKB sangat baik karena selalu melebihi target yang direncanakan. Hal ini juga dikuatkan oleh tingkat efisiensi biaya terhadap realisasi penerimaan PKB yang berada pada kisaran efisien dan sangat efisien. Berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutannya.

Tabel 9. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan PKBTahun 2002 – 2009

Tahun	Efektivitas	Keterangan	Efisiensi	Keterangan
2002	132,359752	Sangat Efektif	17,61	Sangat Efisien
2003	117,225382	Sangat Efektif	22,61	Efisien
2004	121,147077	Sangat Efektif	22,67	Efisien
2005	116,478481	Sangat Efektif	21,87	Efisien
2006	119,890774	Sangat Efektif	24,29	Efisien
2007	114,094508	Sangat Efektif	19,05	Sangat Efisien
2008	122,136537	Sangat Efektif	12,66	Sangat Efisien
2009	105,548099	Sangat Efektif	12,77	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

Tabel 10. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan BBN-KB Tahun 2002 – 2009

Tahun	Efektivitas	Keterangan	Efisiensi	Keterangan
2002	165,992137	Sangat Efektif	12,1	Sangat Efisien
2003	128,938318	Sangat Efektif	13,06	Sangat Efisien
2004	121,547677	Sangat Efektif	11,89	Sangat Efisien
2005	110,984428	Sangat Efektif	11,52	Sangat Efisien
2006	80,7338573	Sangat Efektif	12,16	Sangat Efisien
2007	110,035253	Sangat Efektif	12,97	Sangat Efisien
2008	164,206575	Sangat Efektif	10,74	Sangat Efisien
2009	109,894148	Sangat Efektif	9,89	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tahun 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 10.

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan BBN-KB dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 8 tahun sangat efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa pencapaian penerimaan pajak daerah dari sektor BBN-PKB selalu melebihi target yang direncanakan. Hal ini juga dikuatkan oleh tingkat efisiensi biaya terhadap realisasi penerimaan BBN-KB yang berada pada tingkat sangat efisien. Berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutannya.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-KB tahun 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 11.

Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-KB dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 7 tahun masuk dalam kategori sangat efektif dan hanya 1 tahun saja yang masuk kategori efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik

bahwa pencapaian penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-PKB selalu melebihi target yang direncanakan. Hal ini juga dikuatkan oleh tingkat efisiensi biaya terhadap realisasi penerimaan PBB-KB yang berada pada tingkat sangat efisien. Kondisi ini berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutannya.

Pajak Kendaraan Diatas Air (PKDA)

Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dari sektor PKDA tahun 2002 – 2009 dapat dilihat Tabel 12.

Dari Tabel 12 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PKDA dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 4 tahun pertama masuk dalam kategori sangat efektif, tetapi kurun waktu 2 tahun berikutnya berada pada tingkat cukup efektif, dan meningkat di tahun 2009 menjadi efektif. Walaupun berada pada kondisi yang tidak stabil, hal ini masih merupakan indikasi yang cukup baik karena masih berada pada kisaran 60% keatas. Keadaan ini ternyata dapat distabilkan dengan tingkat efisiensinya karena dalam kurun waktu 7 tahun manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutannya.

Tabel 11. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan PBB-KB Tahun 2002 – 2009

Tahun	Efektivitas	Keterangan	Efisiensi	Keterangan
2002	171,680349	Sangat Efektif	9,11	Sangat Efisien
2003	103,074221	Sangat Efektif	6,15	Sangat Efisien
2004	110,000672	Sangat Efektif	5,87	Sangat Efisien
2005	121,494868	Sangat Efektif	5,75	Sangat Efisien
2006	137,283186	Sangat Efektif	3,97	Sangat Efisien
2007	107,457817	Sangat Efektif	6,87	Sangat Efisien
2008	124,601377	Sangat Efektif	9,32	Sangat Efisien
2009	86,316938	Efektif	3,23	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

Tabel 12. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan PKDA Tahun 2002 – 2009

Tahun	Efektivitas	Keterangan	Efisiensi	Keterangan
2002	-	-	-	-
2003	460,137778	Sangat Efektif	14,38	Sangat Efisien
2004	111,449841	Sangat Efektif	15,14	Sangat Efisien
2005	110,37753	Sangat Efektif	13,98	Sangat Efisien
2006	108,750744	Sangat Efektif	12,51	Sangat Efisien
2007	73,1022481	Cukup Efektif	16,13	Sangat Efisien
2008	64,066135	Cukup Efektif	3,06	Sangat Efisien
2009	94,37225	Efektif	4,02	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

#### Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBN-KDA)

Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dari sektor BBN-KDA dalam kurun waktu 2002 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Dari Tabel 13 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan BBN-KDA dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 6 tahun masuk dalam kategori sangat efektif dan hanya 1 tahun yang berada pada kategori efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa pencapaian penerimaan pajak daerah dari sektor BBN-KDA selalu melebihi target yang direncanakan. Hal ini juga dikuatkan oleh tingkat efisiensi biaya terhadap realisasi penerimaan BBN-KDA yang berada pada tingkat sangat efisien. Berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutannya.

#### Pajak Air Permukaan

Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dari sektor pajak air permukaan dalam kurun waktu 2002 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 14.

Dari Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 6 tahun masuk dalam kategori sangat efektif dan hanya 1 tahun yang berada pada kategori efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa pencapaian penerimaan pajak daerah dari sektor pajak air permukaan selalu melebihi target yang direncanakan. Hal ini juga dikuatkan oleh tingkat efisiensi biaya terhadap realisasi penerimaan pajak air permukaan yang berada pada tingkat sangat efisien. Berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutannya.

#### Pajak Air Bawah Tanah

Tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dari sektor pajak air bawah tanah dalam kurun waktu 2002 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Dari Tabel 15 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 6 tahun masuk dalam kategori sangat efektif dan hanya 1 tahun yang berada pada kategori efektif. Hal ini merupakan indikasi

Tabel 13. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan BBN-KDA Tahun 2002 – 2009

Tahun	Efektivitas	Keterangan	Efisiensi	Keterangan
2002	-	-	-	-
2003	105	Sangat Efektif	2,11	Sangat Efisien
2004	194,954545	Sangat Efektif	1,94	Sangat Efisien
2005	124,541667	Sangat Efektif	1,88	Sangat Efisien
2006	121,780303	Sangat Efektif	2	Sangat Efisien
2007	113,795455	Sangat Efektif	2	Sangat Efisien
2008	91,0833333	Efektif	1,88	Sangat Efisien
2009	105,495868	Sangat Efektif	1,2	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

Tabel 14. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2002 – 2009

Tahun	Efektivitas	Keterangan	Efisiensi	Keterangan
2002	-	-	-	-
2003	181,698571	Sangat Efektif	3,87	Sangat Efisien
2004	124,261303	Sangat Efektif	3,78	Sangat Efisien
2005	101,608367	Sangat Efektif	3,67	Sangat Efisien
2006	110,500635	Sangat Efektif	3,65	Sangat Efisien
2007	97,9488513	Efektif	3,54	Sangat Efisien
2008	100,653418	Sangat Efektif	3,13	Sangat Efisien
2009	103,21371	Sangat Efektif	2,06	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

yang baik bahwa pencapaian penerimaan pajak daerah dari sektor pajak air permukaan selalu melebihi target yang direncanakan. Hal ini juga dikuatkan oleh tingkat efisiensi biaya terhadap realisasi penerimaan pajak air permukaan yang berada pada tingkat sangat efisien. Berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemungutannya.

Setelah dianalisis diketahui bahwa variabel biaya overhead adalah variabel yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap penetapan margin murabahah pembiayaan rumah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Jambi.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan penerimaan pajak daerah selama kurun waktu 2002 – 2009 mengalami peningkatan.
2. Kategori tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah masing-masing sector secara umum masuk kedalam kategori sangat

efektif, begitu juga dengan tingkat efisiensi yang masuk pada kategori sangat efisien.

3. Jenis pajak daerah yang paling efisien dan efektif berdasarkan hasil penelitian adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

#### Saran

1. Perkembangan penerimaan pajak daerah yang terus meningkat harus terus dipertahankan untuk masa yang akan datang, dengan menetapkan target yang ingin dicapai sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
2. Pemungutan pajak daerah harus mampu menekan biaya yang dikeluarkan dan kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan serendah mungkin sehingga manfaat yang didapatkan akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini., 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan praktek*, edisi revisi v, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dajan, Anton. 1986. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta: LP3ES

Tabel 15. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2002 – 2009

Tahun	Efektivitas	Keterangan	Efisiensi	Keterangan
2002	-	-	-	-
2003	181,698571	Sangat Efektif	1,88	Sangat Efisien
2004	101,059475	Sangat Efektif	1,2	Sangat Efisien
2005	106,875849	Sangat Efektif	1,12	Sangat Efisien
2006	124,635643	Sangat Efektif	0,58	Sangat Efisien
2007	112,710006	Efektif	0,54	Sangat Efisien
2008	113,030305	Sangat Efektif	0,56	Sangat Efisien
2009	112,283167	Sangat Efektif	2,06	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

- Dinas Pendapatan Daerah. 2010. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Jambi.
- Kuncoro, Mudrajad, 1993. "Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan", Analisis CSIS, XXII(2), Maret-April
- Mulyanto. 2002. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah. Disertasi University of Maryland at College Park Tidak Dipublikasikan
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Majalah Ilmiah Sosial Humaniora Vol. 7 No. 2 Desember.
- Sekaran. 2003. Reaserch Methode for Bisniss.
- Sidik, Machfud. 1994. Keuangan Daerah. Universitas Terbuka Jakarta
- Suarja, Wayan. 2007. Fasilitas Pajak Penghasilan dan Manfaatnya Bagi Koperasi dan UKM. Makalah Lokalatih Teknis Nasional tanggal 8 Maret.
- Sumardiyanti, Valentina dan Aji Suryo. 2003. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

